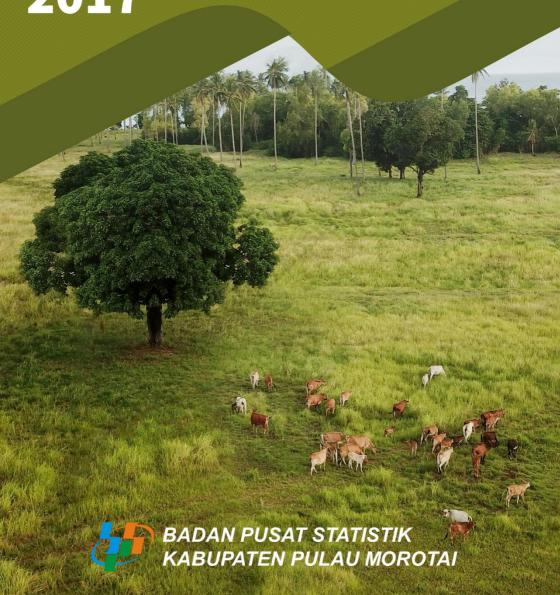
Katalog: 9201001.8207









Indikator Ekonomi

Kabupaten Pulau Morotai

Tahun 2017

No. katalog BPS : 9201001.8207

Ukuran Buku : $14.28 \text{ cm} \times 21 \text{ cm}$

Jumlah Halaman : vii + 37 halaman

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit : Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai

Dicetak Oleh : BPS Kabupaten Pulau Morotai

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas kehendaknya Publikasi tahunan "Indikator Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017" dapat diselesaikan. Penerbitan Publikasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan data di Kabupaten Pulau Morotai utamanya terkait dengan bidang ekonomi.

Publikasi ini berisi data beberapa indikator ekonomi. Penyajian publikasi ini berbentuk penjelasan yang disertai tabel, serta ulasan sederhana mengenai perkembangan indikator ekonomi Pulau Morotai selama tahun 2017.

Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan selama ini, selain itu sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penerbitan publikasi ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi serupa di masa yang akan datang.

> Morotai, September 2018 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai

Heru Agung Santoso, S.ST, M.Stat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I Produk Domestik Regional Bruto	1
BAB II Pertanian sebagai Sektor Utama Perekkonomian	11
BAB III Keuangan Daerah	17
BAB IV Transportasi Laut dan Udara	23
I.AMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau	
Morotai Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)	2
Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai	
Tahun 2013-2017	8
Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di	
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017	20
Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai	
Tahun 2017	21
Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluar	an
di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017	22
Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pad	a
Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017	23
Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut	
Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun	
2017	24
Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada	
Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun	
2017	25

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usal	ıa
Tahun 2017	3
Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Ta	hun
2012-2017	5
Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan sl	nare
PDRB terbesar tahun 2017	6
https://norotalkalo.	

https://norotalkab.bps.go.id

BAB I

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Indikator ekonomi yang akan diuraikan dalam tinjauan perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha meliputi nilai nominal PDRB, struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita dan Indeks Harga Implisit.

Tabel 1. PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Tahun	Atas Dasar Harga	Atas Dasar Harga		
Tanun	Berlaku	Konstan		
(1)	(2)	(3)		
2013	855.680,2	728.721,8		
2014	967.070,3	773.862,4		
2015	1.080.578,8	821.322,2		
2016*	1.201.896,7	872.948,1		
2017**	1.319.055,8	928.561,4		

^{*)} Angka Sementara

PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Penyajian atas dasar harga berlaku dimaksudkan untuk memperoleh gambaran besaran nilai tambah yang bisa dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, sedangkan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk melihat secara rill besaran nilai tambah yang dihasilkan setelah pengaruh harga dihilangkan.

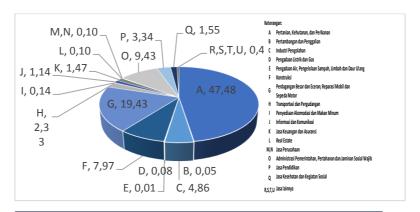
^{**)} Angka Sangat Sementara

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku, dari nilai tambah yang diciptakan, perekonomian Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 mampu menghasilkan PDRB sebesar Rp. 1,2 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp. 1,08 triliun. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2016 mencapai Rp. 872,9 miliar. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 821,3 miliar.

Sedangkan pada tahun 2017 meningkat cukup tajam hingga mencapai Rp. 1.319,05 miliar untuk PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 928,5 miliar.

Secara umum, struktur ekonomi menggambarkan besarnya peranan masing-masing kategori lapangan usaha dalam penciptaan PDRB suatu daerah. Disamping itu, struktur ekonomi juga dapat menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap suatu kategori. Kategori lapangan usaha yang mempunyai peranan yang cukup besar akan menjadi andalan bagi daerah.

Grafik 1. Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017



Struktur PDRB Kabupaten Pulau Morotai menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku tahun 2017 didominasi tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 47,48 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 19,43 persen, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,43 persen.

Secara umum peranan masing-masing kategori lapangan usaha selama periode tiga tahun terakhir dari tahun 2014 hingga tahun 2017 tidak menunjukan perubahan yang berarti, cenderung masih berada dikisaran angka yang sama. Secara lebih rinci, besarnya andil masing-masing kategori yang menjadi motor penggerak perekonomian Kabupaten Pulau Morotai berada pada struktur perekonomian Kabupaten Pulau Morotai.

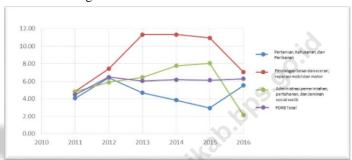
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan memberi gambaran tentang tingkat ekonomi yang terjadi, dimana pergerakan laju pertumbuhan ini merupakan indikator penting untuk mengetahui hasil pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dimasa yang akan datang.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 meningkat sebesar 6,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh 39,86 persen. Lapangan usaha yang mengalami pelambatan yang signifikan dialami oleh kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,12 persen. Pelambatan tersebut dipengaruhi oleh penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat hingga tiga kali pemotongan anggaran.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013-2017



Besarnya andil suatu kategori terhadap nilai total PDRB suatu daerah juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain, pergerakan kategori lapangan usaha yang memiliki andil besar memiliki pengaruh yang besar juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Dominasi tiga lapangan usaha tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten Pulau Morotai. Laju pertumbuhan untuk kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,54 persen, sedangkan untuk Perdagangan besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor mengalami pelambatan sebesar 7,06 persen, dan untuk Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan jaminan Sosial Wajib sebesar 2,12 persen.



Grafik 3. Pertumbuhan Ekonomi untuk tiga kategori dengan share PDRB terbesar tahun 2017

Jika melihat pertumbuhan pada masing-masing kategori di tahun 2016, ada 10 kategori yang pertumbuhannya berada diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai (diatas 6,37 persen), yaitu kategori pengadaan listrik dan gas, kategori Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori kontruksi, kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori real estate, dan kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sedangkan 7 kategori lainnya berada dibawah angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pulau Morotai diantaranya yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori Jasa perusahaan, kategori Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa Pendidikan dan kategori jasa lainnya. Dengan pertumbuhan paling kecil pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang hanya mencapai 2,1 persen.

Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat, dimana pendapatan per kapita ini dapat didekati dengan PDRB per kapita. Namun demikian, PDRB per kapita ini tidak secara langsung dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat.

PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Dengan demikian, PDRB per kapita sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya dua variabel tersebut. Dengan kata lain, jika nilai PDRB besar sedangkan jumlah penduduknya sedikit maka PDRB per kapita akan menjadi besar, sebaliknya apabila nilai PDRB kecil sedangkan jumlah penduduknya banyak maka PDRB per kapita akan menjadi kecil nilainya.

Angka PDRB per kapita dinilai dengan dua cara, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB per kapita ADHB dapat menggambarkan NTB per kapita yang masih dipengaruhi harga komoditi yang dihasilkan. PDRB per kapita ADHK adalah pertumbuhan nyata ekonomi per kapita, umumnya digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur ekonomi rakyat secara keseluruhan. Walaupun terjadi peningkatan PDRB per kapita akan tetapi hal ini belum dapat menggambarkan tingkat penyebaran pendapatan masyarakat di setiap strata ekonomi.

Tabel 2. PDRB per Kapita Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2013-2017

m 1	PDRB Per Kapita		
Tahun -	ADHB	ADHK	
(1)	(2)	(3)	
2013	13.703.771	12.271.499	
2014	14.864.592	12.659.113	
2015	16.362.733	13.093.676	
2016*	17.794.041	13.524.827	
2017**	19.257.462	13.986.864	

^{*)} Angka Sementara

PDRB per kapita penduduk kabupaten Pulau Morotai atas dasar harga berlaku meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sebesar 14,86 juta rupiah, tahun 2014 meningkat menjadi 16,36 juta rupiah, tahun 2015 sebesar 17,79 juta rupiah dan pada tahun 2016 sebesar 19,25 juta rupiah. Akan tetapi kenaikan PDRB perkapita tersebut tidak riil, karena angka tersebut masih dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa. PDRB perkapita yang riil tercermin dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan, dimana pendapatan sebesar 12,65 juta rupiah pada tahun 2013, meningkat di

^{**)} Angka Sangat Sementara

tahun 2014 sebesar 13,09 juta rupiah, pada tahun 2015 sebesar 13,52 juta rupiah dan pada tahun 2016 mencapai 13,96 juta rupiah.

Perlu diketahui bahwa indikator PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pendapatan per kapita penduduk. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Namun dengan segala keterbatasannya, indikator PDRB per kapita dapat menunjukan pe at. tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB II

PERTANIAN SEBAGAI SEKTOR UTAMA PEREKONOMIAN

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian daerah dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDRB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan.

Kesadaran terhadap peran tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat masih tetap memelihara kegiatan pertanian mereka meskipun negara telah menjadi negara industri.

Sehubungan dengan itu, pengendalian lahan pertanian merupakan salah satu kebijakan nasional yang strategis untuk tetap memelihara industri pertanian primer dalam kapasitas penyediaan pangan, dalam kaitannya untuk mencegah kerugian sosial ekonomi dalam jangka panjang mengingat sifat multi fungsi lahan pertanian.

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri. atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam (crop cultivation) serta pembesaran hewan ternak (raising), meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan, seperti pembuatan keju dan tempe, atau sekedar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan.

Sektor pertanian memiliki sumbangan terhadap nilai PDRB kabupaten Pulau Morotai hampir 50 persen. Walaupun andilnya cenderung menurun untuk setiap tahunnya. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB kabupaten Pulau Morotai sebesar 47,26 persen. Angka tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang memiliki kontribusi sebesar 47,48 persen. dalam 5 tahun terahir ini, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan, padahal kondisi pada tahun 2013 kontribusinya mencapai 49,07 persen.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Usaha pertanian diberi nama khusus untuk subjek usaha tani tertentu. Kehutanan adalah usaha tani dengan subjek tumbuhan (biasanya pohon) dan diusahakan pada lahan yang setengah liar atau liar (hutan). Peternakan menggunakan subjek hewan darat kering (khususnya semua vertebrata kecuali ikan dan amfibia) atau serangga (misalnya lebah). Perikanan memiliki subjek hewan perairan (termasuk amfibia dan semua non-vertebrata air). Suatu usaha pertanian dapat melibatkan berbagai subjek ini bersama-sama dengan alasan efisiensi dan peningkatan keuntungan. Pertimbangan akan kelestarian lingkungan mengakibatkan aspek-aspek konservasi sumber daya alam juga menjadi bagian dalam usaha pertanian.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih/bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk, pengolahan dan pengemasan produk, dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan maksimal maka ia melakukan pertanian intensif (intensive farming). Usaha pertanian yang dipandang dengan cara ini dikenal sebagai agribisnis. Program dan kebijakan yang mengarahkan usaha pertanian ke cara pandang demikian dikenal sebagai intensifikasi. Karena pertanian industrial selalu menerapkan pertanian intensif, keduanya sering kali disamakan.

Sisi yang berseberangan dengan pertanian industrial adalah pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture). Pertanian berkelanjutan, dikenal juga dengan variasinya seperti pertanian organik atau permakultur, memasukkan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensinya. Akibatnya, pertanian berkelanjutan biasanya memberikan hasil yang lebih rendah daripada pertanian industrial.

Pertanian modern masa kini biasanya menerapkan sebagian komponen dari kedua kutub "ideologi" pertanian yang disebutkan di atas. Selain keduanya, dikenal pula bentuk pertanian ekstensif (pertanian masukan rendah) yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional akan berbentuk pertanian subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya.

Menurut Kuznets. Sektor pertanian di LDC's mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk:

a. Kontribusi Produk

Penyediaan makanan untuk penduduk, penyediaan bahan baku untuk industri manufaktur seperti industri: tekstil, barang dari kulit, makanan & minuman

b. Kontribusi Pasar

Pembentukan pasar domestik untuk barang industri & konsumsi

c. Kontribusi Faktor Produksi

Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal & TK dari sector pertanian ke Sektor lain

d. Kontribusi Devisa

Pertanian sbg sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekpspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Peran sektor pertanian di Indonesia dinilai belum memuaskan, pemerintah justru terkesan menyampingkan masalah sektor pertanian, padahal sebagai negara agraris sektor pertanian Indonesia harusnya menarik perhatian lebih pemerintah dari segi kualitas dan fasilitas yang memadai. Sektor pertanian Indonesia menjadi salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Semakin majunya sektor pertanian di Indonesia, tentu saja dapat meningkatkan perekonomian negara.

Pada tahun 2017 tanaman padi sawah memliki luas lahan 2.426 Ha luas panen sebesar 1.449 Ha dan produksi sebesar 5.796 Ton. Kemudian, untuk komoditi ubi kayu memilki luas lahan sebesar 340 Ha dengan luas panen sebesar 230 Ha dan produksi sebesar 920 Ton.

Pada tahun 2017 kelompok tanaman sayur-sayuran memiliki luas lahan 120 Ha, luas panen sebesar 105 Ha dan produksi sebesar 210 Ton.

Kabupaten Pulau Morotai memiliki 4 komoditi unggulan, yaitu kelapa, cengkeh, pala, dan kakao. Pada tahun 2017, tanaman kelapa memiliki luas area 12.775 Ha dan produksi sebesar 10.721 Ton, cengkeh memiliki luas area sebesar 3.156 dan produksi sebesar 109 Ton, pala memiliki luas area sebesar 4.109 Ha dan produksi sebesar 102 Ton, dan kakao memiliki luas lahan sebesar 1.298 Ha dan produksi sebesar 30 Ton

Terdapat empat jenis ternak di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari sapi, kambing, babi, dan unggas. Jumlah populasi masingmasing jenis ternak pada tahun 2017 secara berurutan sebanyak 8.998 ekor sapi, 10.081 ekor kambing, 7.845 ekor babi, 25.088 ekor ayam buras

Terdapat empat jenis ternak di Kabupaten Pulau Morotai yang terdiri dari sapi, kambing, babi, dan unggas. Jumlah populasi masingmasing jenis ternak pada tahun 2017 secara berurutan sebanyak 8.998 ekor sapi, 10.081 ekor kambing, 7.845 ekor babi, 25.088 ekor ayam buras

Pada tahun 2017 di Kabupaten Pulau Morotai tercatat luas area untuk hutan lindung sebesar 93.346,79 Ha. Hutan produksi terbatas sebesar 56.467,50 Ha, hutan produksi konservasi sebesar 42.802,87 Ha, dan areal penggunaan lain sebesar 42.118,57 Ha

BAB III

KEUANGAN DAERAH

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah berubah seiring dengan adanya desentralisasi fiskal. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 pada pasal 66 ayat 1, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada output, menggunakan konsep nilai uang (value for money) dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dari perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan (PP. Nomor 105 tahun 2000, pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimumkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya. Ketiga aspek tersebut meliputi:

- 1. Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- 2. Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- 3. Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek berikut :

- 1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan.
- 2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif serta diawasi oleh badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat daerah.
- 3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya.
- 4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
- 5. Dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu wujud pengelolaan keuangan daerah. APBD adalah sebuah rencana yang disusun dalam bentuk kuantitatif dalam satuan moneter untuk suatu periode, yang biasanya satu tahun. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, dan belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pemerintahan maupun pembangunan daerah. Penerimaan daerah Kabupaten Pulau Morotai selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Implementasi kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, mendorong peningkatan besaran APBD yang diterima oleh pemerintah daerah. Peningkatan penerimaan daerah ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kemandirian daerah, sesuai dengan tujuan pelaksanaan Daerah diharapkan otonomi daerah. mampu pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan juga mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat, karena dalam era desentralisasi fiskal ini, penerimaan daerah merupakan modal utama dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Penerimaan daerah terdiri dari beberapa komponen yaitu Pendapatan Asli daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan lain yang sah. Perkembangan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai secara umum selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan yang besar ini tidak lain adalah disebabkan meningkatnya sumber penerimaan daerah dari dana perimbangan (DAU & DAK). Bila dilihat menurut komponen atau sumber penerimaan daerah, maka komponen terbesar dari penerimaan daerah adalah dana perimbangan yang berupa DAU, BHPBP, dan DAK yang memiliki kontribusi sekitar 95% dari penerimaan daerah. Sedangkan PAD hanya memberikan kontribusi sekitar 1,2%. Rendahnya proporsi penerimaan PAD dibandingkan dengan DAU mengindikasikan belum optimalnya pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai dalam menggali sumber-sumber penerimaan. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD terhadap total penerimaan daerah antara lain adalah:

- 1. Tingkat hidup dan ekonomi masyarakat masih rendah
- 2. Belum optimalnya pemerintah daerah dalam menggali sumbersumber pendapatan yang ada.

Tabel 3. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
PAD	20 944,95	3,26
Dana Perimbangan	498 341,52	77,80
Lainnya	121 220,49	18,94
Jumlah	640 506,96	100

Menurut Undang-Undang Nomor 33/2004 komponen PAD terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan secara umum pemerintah daerah berusaha meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelengaraan otonomi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tabel 4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai **Tahun 2017**

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	4 007,33	19,13
Retribusi	2 454,82	11,71
Bagi Hasil	-	-
Lain-lain PAD	14 482,80	69,16
Jumlah	20 944,95	100

Jumlah keseluruhan dana APBD baik yang berasal dari PAD maupun dana perimbangan menjadi sumber pembiayaan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing pemerintah daerah.

Besarnya total belanja tidak terlepas dari bagaimana kondisi belanja masing-masing daerah. Adanya perbedaan potensi, kondisi dan kebijakan dari masing-masing daerah, mengakibatkan prioritas pembangunan dari masing-masing daerah juga berbeda.

Tabel 5. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Juta Rupiah)

	Janis Dangalyanan	2017
	Jenis Pengeluaran	2017
	(1)	(2)
A	Belanja Tidak Langsung	280 715,60
	Belanja Pegawai	165 750,99
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Bantuan Keuangan	106 816,69
	Belanja Hibah	4 809,65
	Belanja Bantuan Sosial	3 038,27
	Belanja Tidak Terduga	300,00
В	Belanja Langsung	339 064,18
	Belanja Pegawai	41 656,31
	Belanja Barang & Jasa	123 238,26
	Belanja Modal	174 169,78
	Jumlah / Total	619 779,78

BAB IV TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA

Terdapat dua pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Pulau Morotai yaitu Pelabuhan Imam Lastori di Desa Daruba dan Pelabuhan Ferry di Desa Juanga. Dari kedua pelabuhan tersebut kapal yang masuk ke Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 924 unit pada tahun 2017 yang seluruhnya merupakan kapal untuk pelayaran dalam negeri dengan rata-rata kapal yang masuk sekitar 77 kapal untuk setiap bulannya. Kunjungan kapal yang paling banyak terjadi pada bulan Maret 2017 dengan jumlah sekitar 90 kapal.

Tabel 6. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Bulan	Jumlah Kapal
(1)	(2)
Januari	70
Februari	68
Maret	90
April	88
Mei	85
Juni	74
Juli	79
Agustus	72
September	77
Oktober	83
November	69
Desember	69

Pergerakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut di Pulau Morotai pada tahun 2017 cukup mengalami fluktuasi setiap bulannya. Jumlah penumpang yang turun pada pelabuhan di Kabupeten Pulau Morotai adalah sebanyak 28.520 orang, sedangkan yang naik dari pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai sebanyak 23.043 orang. Dengan jumlah penumpang paling banyak menggunakan jasa angkutan laut ini pada bulan Juni 2017 yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.

Tabel 7. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Bulan		Jumlah Penumpang (orang)		Perkembangan/Perubahan (%)	
	Turun	Naik	Turun	Naik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Januari	3.531	2.369			
Februari	2.177	1.854	-38,35	-21,74	
Maret	2.521	1.985	15,80	7,07	
April	2.711	1.973	7,54	-0,60	
Mei	1.970	1.732	-27,33	-12,21	
Juni	3.048	2.638	54,72	52,31	
Juli	4.383	3.259	43,80	23,54	
Agustus	2.090	1.254	-52,32	-61,52	
September	1.822	1.695	-12,82	35,17	
Oktober	1.529	1.584	-16,08	-6,55	
November	1.337	1.058	-12,56	-33,21	
Desember	1.401	1.642	4,79	55,20	

Selain untuk angkutan penumpang, jasa transportasi laut ini juga menjadi faktor penting dalam perekonomian kabupaten Pulau Morotai yaitu dalam pengangkutan barang. Jumlah barang yang dibongkar dan muat pada pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai meningkat tajam sejak adanya tol laut yang sudah mulai beroperasi pada tahun 2017. Namun, pemanfaatan tol laut belum terlalu signifikan dampaknya terhadap perekonomian.

Tabel 8. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

	Perkembangan/Perubahan			
Bulan	Jumlah Bagasi (kg) Bongkar Muat		(%) Bongkar Muat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	6.088	1.093		
Februari	6.396	654	5,06	-40,16
Maret	10.918	2.792	70,70	326,91
April	7.786	1.934	-28,69	-30,73
Mei	1.017	650	-86,94	-66,39
Juni	3.072	452	202,06	-30,46
Juli	2.052	526	-33,20	16,37
Agustus	6.694	512	226,22	-2,66
September	4.409	1.314	-34,14	156,64
Oktober	1.850	786	-58,04	-40,18
November	12.820	544	592,97	-30,79
Desember	3.407	686	-73,42	26,10

Selain transportasi laut, Kabupaten Pulau Morotai dapat diakses melalui jalur Transportasi Udara. Di Kabupaten Pulau

Morotai terdapat satu bandara yaitu Bandara Pitu yang terletak di Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan. Jasa angkutan udara untuk umum pada tahun 2017 baru dimulai bulan April. Pada tahun sebelumnya memang sudah ada penerbangan untuk Morotai-Ternate, namun dengan pesawat yang hanya bermuatan 10 https://norotalkab.hps.do.id penumpang. Namun sejak Desember 2016 pesawat tersebut berhenti terbang di Morotai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	511.325,6	570.664,2	623.355,6
В	Pertambangan dan Penggalian	572,4	634,5	704,6
C	Industri Pengolahan	55.188,7	58.403,8	61.176,3
D	Pengadaan Listrik dan Gas	591,8	994,6	1.250,9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	151,6	166,2	184,2
F	Konstruksi	84.245,3	95.827,2	108.612,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Se	210.280,7	233.560,8	258.796,9
Н	Transportasi dan Pergudangan	22.305,7	28.063,3	32.192,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.483,5	1.698,5	1.893,7
J	Informasi dan Komunikasi	12.540,6	13.741,2	15.186,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	15.367,0	17.687,3	18.896,8
L	Real Estate	1.086,5	1.235,7	1.356,4
M,N	Jasa Perusahaan	1.115,1	1.249,8	1.411,8
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	106.985,4	113.347,9	122.153,9
P	Jasa Pendidikan	35.843,6	40.183,8	44.999,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.165,9	18.583,0	20.569,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	5.329,2	5.854,7	6.315,6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1.080.578,8	1.201.896,7	1.319.055,8

Lampiran 2. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	383.259,0	404.498,5	427.873,3
В	Pertambangan dan Penggalian	449,3	476,3	506,8
C	Industri Pengolahan	44.660,2	46.445,2	47.821,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	617,6	863,8	952,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	120,9	131,0	142,4
F	Konstruksi	63.929,4	70.551,3	77.577,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Se	163.272,4	174.792,4	187.163,0
Н	Transportasi dan Pergudangan	16.666,8	20.126,4	22.397,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.087,0	1.164,8	1.238,8
J	Informasi dan Komunikasi	10.854,4	11.671,0	12.643,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11.548,8	12.969,9	13.238,9
L	Real Estate	946,2	1.009,9	1.077,2
M,N	Jasa Perusahaan	949,3	1.007,0	1.074,5
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	75.336,2	76.935,1	81.619,0
P	Jasa Pendidikan	30.666,0	32.156,1	33.743,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.447,4	13.371,6	14.418,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.511,3	4.777,8	5.073,0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	821.322,2	872.948,1	928.561,4

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha tahun 2015-2017 (Persen)

Kategori	Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,3	47,5	47,3
В	Pertambangan dan Penggalian	0,1	0,1	0,1
C	Industri Pengolahan	5,1	4,9	4,6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,1	0,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0
F	Konstruksi	7,8	8,0	8,2
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Se	19,5	19,4	19,6
Н	Transportasi dan Pergudangan	2,1	2,3	2,4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,1	0,1	0,1
J	Informasi dan Komunikasi	1,2	1,1	1,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,4	1,5	1,4
L	Real Estate	0,1	0,1	0,1
M,N	Jasa Perusahaan	0,1	0,1	0,1
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,9	9,4	9,3
P	Jasa Pendidikan	3,3	3,3	3,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,5	1,5	1,6
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,5	0,5	0,5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,0	100,0	100,0

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2017 (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,9	5,5	5,8
В	Pertambangan dan Penggalian	4,9	6,0	6,4
С	Industri Pengolahan	4,5	4,0	3,0
D	Pengadaan Listrik dan Gas	36,0	39,9	10,2
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,4	8,4	8,7
F	Konstruksi	10,81	10,36	9,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Se	10,94	7,06	7,08
Н	Transportasi dan Pergudangan	7,91	20,76	11,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,11	7,16	6,36
J	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,52	8,34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18,82	12,30	2,07
L	Real Estate	3,54	6,73	6,66
M,N	Jasa Perusahaan	6,04	6,07	6,71
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,06	2,12	6,09
P	Jasa Pendidikan	4,80	4,86	4,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,23	7,43	7,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,71	5,91	6,18
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,13	6,29	6,37

Lampiran 5. Laju Implisit PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2015-2017 (persen)

Kategori	Uraian	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,17	5,74	3,27
В	Pertambangan dan Penggalian	5,16	4,55	4,37
C	Industri Pengolahan	4,89	1,76	1,73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,61	20,16	14,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur I Ilano	4,87	1,19	1,94
F	Konstruksi	5,42	3,07	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Se	4,73	3,75	3,48
Н	Transportasi dan Pergudangan	9,54	4,19	3,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	6,84	4,82
J	Informasi dan Komunikasi	3,93	1,91	2,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,04	2,49	4,67
L	Real Estate	4,57	6,56	2,91
M,N	Jasa Perusahaan	5,04	5,67	5,85
0	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,38	3,75	1,58
P	Jasa Pendidikan	5,65	6,91	6,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	7,01	2,65
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,24	3,73	1,60
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,28	4,65	3,17

Lampiran 6. Sumber Penerimaan Daerah & Kontribusinya di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Sumber Penerimaan	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
PAD	20 944,95	3,26
Dana Perimbangan	498 341,52	77,80
Lainnya	121 220,49	18,94
Jumlah	640 506,96	100

Lampiran 7. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

PAD	Penerimaan (Juta Rupiah)	%
Pajak Daerah	4 007,33	19,13
Retribusi	2 454,82	11,71
Bagi Hasil	-	-
Lain-lain PAD	14 482,80	69,16
Jumlah	20 944,95	100

Lampiran 8. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis pengeluaran di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 (Juta Rupiah)

	Jenis Pengeluaran	2017
	(1)	(2)
A	Belanja Tidak Langsung	280 715,60
	Belanja Pegawai	165 750,99
	Belanja Subsidi	-
	Belanja Bantuan Keuangan	106 816,69
	Belanja Hibah	4 809,65
	Belanja Bantuan Sosial	3 038,27
	Belanja Tidak Terduga	300,00
В	Belanja Langsung	339 064,18
	Belanja Pegawai	41 656,31
	Belanja Barang & Jasa	123 238,26
	Belanja Modal	174 169,78
	Jumlah / Total	619 779,78

Lampiran 9. Jumlah dan Perkembangan Kunjungan Kapal Laut pada Pelabuhan di kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Bulan	Jumlah Kapal		
(1)	(2)		
Januari	70		
Februari	68		
Maret	90		
April	88		
Mei	85		
Juni	74		
Juli	79		
Agustus	72		
September	77		
Oktober	83		
November	69		
Desember	69		

Lampiran 10. Jumlah dan Perkembangan Penumpang Angkutan Laut Pada Pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

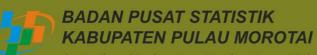
Bulan		Jumlah Penumpang (orang)		an/Perubahan %)
	Turun	Naik	Turun	Naik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	3.531	2.369	•	8
Februari	2.177	1.854	-38,35	-21,74
Maret	2.521	1.985	15,80	7,07
April	2.711	1.973	7,54	-0,60
Mei	1.970	1.732	-27,33	-12,21
Juni	3.048	2.638	54,72	52,31
Juli	4.383	3.259	43,80	23,54
Agustus	2.090	1.254	-52,32	-61,52
September	1.822	1.695	-12,82	35,17
Oktober	1.529	1.584	-16,08	-6,55
November	1.337	1.058	-12,56	-33,21
Desember	1.401	1.642	4,79	55,20

Lampiran 11. Jumlah dan Perkembangan Angkutan Barang pada Pelabuhan Laut di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017

Bulan	Jumlah Bag	Jumlah Bagasi (kg)		Perkembangan/Perubahan (%)	
Dulan	Bongkar			Muat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Januari	6.088	1.093	40		
Februari	6.396	654	5,06	-40,16	
Maret	10.918	2.792	70,70	326,91	
April	7.786	1.934	-28,69	-30,73	
Mei	1.017	650	-86,94	-66,39	
Juni	3.072	452	202,06	-30,46	
Juli	2.052	526	-33,20	16,37	
Agustus	6.694	512	226,22	-2,66	
September	4.409	1.314	-34,14	156,64	
Oktober	1.850	786	-58,04	-40,18	
November	12.820	544	592,97	-30,79	
Desember	3.407	686	-73,42	26,10	







Jln. H. Ahmad Syukur, Desa Daruba, Morotai Selatan, Pulau Morotai Telp. (0923) 2221133, Homepage: http://morotaikab.bps.go.id/ Email: bps8207@bps.go.id